



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUMINTO
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 159113

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.895.736.000**

- Tanah dan Bangunan Seluas 163 m2/144 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 845.736.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 213 m2/156 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.050.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **182.000.000**

- MOBIL, HONDA HONDA BRIO SATYA 1.2E CVT CKD Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
- MOTOR, PIAGGIO VESPA LX 150 IE AIT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **35.000.000**

D. SURAT BERTAHAP **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **3.680.652.696**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **8.793.388.696**

III. HUTANG **Rp.** **134.515.199**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **8.658.873.497**

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN FISKAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DALYONO
2. Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN MADYA
3. NHK : 83806

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.027.800.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 45 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 203.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 668.300.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/100 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 156.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 307.100.000

1. LAINNYA, --- (SEPEDA ANGIN) SEPEDA Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 100.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI MOBIL PENUMPANG Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 47.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 31.640.067

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.413.540.067

III. HUTANG Rp. 454.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 959.540.067



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NOVI PUSPITA WARDANI
2. Jabatan : KEPALA SUBDIREKTORAT ANALISIS KEUANGAN DAN PASAR SURAT UTANG
NEGARA
3. NHK : 132712

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.016.600.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI , LAINNYA , Rp. 1.716.600.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 460.000.000

1. MOBIL, TOYOTA COROLLA ALTIS SEDAN Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2023, HASIL SENDIRI , LAINNYA , Rp. 410.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 148.100.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 2.110.324.977

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.763.326.868

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.498.351.845

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.498.351.845

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Tony Prianto
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 401482

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.200.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 206 m2/1 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/185.5 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **460.000.000**

1. MOTOR, HODA E1F02N Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **53.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **1.334.007.804**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **49.401.207**

Sub Total **Rp.** **6.096.409.011**

III. HUTANG **Rp.** **91.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **6.005.409.011**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **UBAIDI SOCHEH HAMIDI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL**
3. NHK : **120992**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.577.993.870**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/50 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 205.990.202
2. Tanah dan Bangunan Seluas 173 m2/198 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.119.041.411
3. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/89 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 685.927.109
4. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 326.287.803
5. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/36 m2 di KAB / KOTA LEBAK, HASIL SENDIRI Rp. 338.003.219
6. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA LEBAK, HASIL SENDIRI Rp. 261.228.013
7. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/40 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 533.934.500
8. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/35 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.107.056.500
9. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 310.716.078
10. Tanah dan Bangunan Seluas 232 m2/35 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 25.430.375
11. Tanah dan Bangunan Seluas 21.1 m2/21.1 m2 di KAB / KOTA



KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 289.378.660

12. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/36 m² di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **590.225.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000
2. LAINNYA, ---(3 BUAH SEPEDA GUNUNG) SEPEDA Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 675.000
3. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 72.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU SIRION MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 76.500.000
5. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.250.000
6. MOBIL, SUZUKI IGNIS MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 95.500.000
7. MOBIL, NISSAN SERENA MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 337.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **72.045.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **1.000.000.000**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **2.889.882.692**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **10.130.146.562**

III. HUTANG **Rp.** **1.411.940.701**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **8.718.205.861**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERI SETIAWAN**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **126823**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.100.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/139 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/40 m2 di KAB / KOTA BEKASI,
HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **16.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI
Rp. 1.000.000
2. MOTOR, YAMAHA LEXY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **275.000.000**

D. SURAT BERTAGIH **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **4.994.606.093**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **7.385.606.093**

III. HUTANG **Rp.** **4.200.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **7.381.406.093**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HIDAYAT AMIR
2. Jabatan : KEPALA PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN
3. NHK : 480289

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.975.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 1.975.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/115 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.025.000.000

1. MOBIL, HONDA BRIO RS CVT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOBIL, HONDA CITI HATCHBACK Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RAIZE MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
4. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 515.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 98.222.526

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.055.096.750

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 7.153.319.276

III. HUTANG Rp. 1.698.521.875

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.454.797.401



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIAN LESTARI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 729102

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.878.321.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 83 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 720 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.019.520.000
3. Tanah Seluas 198 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 204.336.000
4. Bangunan Seluas 31 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 317 m2/110 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.346.765.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 44.75 m2/44.75 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.577.700.000
7. Tanah Seluas 86 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
8. Tanah Seluas 68 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
9. Tanah Seluas 70 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
10. Tanah Seluas 72 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
11. Tanah Seluas 260 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI



Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

2.090.000.000

1. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, VESPA 125 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. MOBIL, TOYOTA VELLFIRE Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000
4. MOTOR, TRIUMPH STREET TWIN Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. MOBIL, WULING CLOUD EV Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 365.000.000
6. MOBIL, SUZUKI JIMNY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
7. MOTOR, TRIUMPH STREET TWIN Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

260.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp.

1.935.559.110

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

4.926.824.831

F. HARTA LAINNYA

Rp.

4.489.286.434

Sub Total

Rp.

19.579.991.375

III. HUTANG

Rp.

1.283.292.922

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

18.296.698.453

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DENI RIDWAN
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 767965

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.275.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 182.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 453.599.999

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 249.206.005

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.300.306.004

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.300.306.004

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENDAH MARTININGRUM
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 145845

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	881.332.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 510 m2/60 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 82.600.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2164 m2/180 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 798.732.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	34.785.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	15.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	187.621.631
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.118.738.631

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **1.118.738.631**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.